

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

1. Studi Kepustakaan

1.1 Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan menurut Rosenthal (dalam Ndraha, 1997;16) adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Menurut Syafiie (2011;20) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas.

Ilmu pemerintahan menurut Syafiie (2011;23) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya, secara baik dan benar.

Ilmu pemerintahan menurut Ndraha (dalam Syafiie, 2011;8) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Dengan demikian menurut Syafiie (2011;10) ilmu pemerintahan dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legilasi, yudikasi, dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

1.2 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafiie, 2011;5).

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung menurut (Syafiie, 2011;5), yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
- c. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat
- d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat (Ndraha, 1997;6).

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha (dalam Napitupulu, 2012;7) menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Menurut Napitupulu (2012;9) Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Syafiie (2011;10) menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), Pemberdayaan (Empowering), dan Pengaturan (Regulation) (dalam Labolo, 2006;22). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.

1.3 Organisasi dan Manajemen Pemerintahan

Pengertian organisasi menurut Mooney (dalam Syafiie, 2011;11) adalah sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan tertentu bersama.

Lain lagi menurut Gulick (dalam Syafiie, 2011;12) dimana memberikan definisi organisasi sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dari pada atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kdasar dari seluruh badan usaha.

Menurut Millet (dalam Syafiie, 2011;11) organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Definisi organisasi menurut Syafiie (2011;12) adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dari atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kdasar dari seluruh badan usaha.

Dari definisi-definisi tersebut diatas penulis berkesimpulan bahwa organisasi merupakan (Syafiie, 2011;12):

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi
2. Didalam terjadinya berbagai hubungan atas individu maupun kelompok baik dari organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi
3. Terjadinya proses dan pembagian tugas
4. Berlangsungnya proses aktifitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Menurut Tead (dalam Syafiie, 2011;2) manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Definisi manajemen yang lain menurut Millet (dalam Syafiie, 2011;2) yakni proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Hal-hal atau peristiwa khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah sudah sangat pasti akan berkaitan dengan kebijakan public. Kebijakan publik yang diformulasikan oleh daerah secara luas memberikan warna-warna tertentu pada setiap daerah (Agustino, 2008;4)

Kebijakan publik menurut Laswell dan Kaplan dalam Adisasmita (2011;213) kebijakan publik adalah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Pengertian kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino, 2008;7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sementara itu menurut Rose (dalam Agustino, 2008;7) yakni sebuah rangkaian

panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Dye (dalam Santosa, 2012;27) memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Pengertian kebijakan publik menurut para ahli adalah Dye dalam Syafiie, (2006;105) dimana dikatakan kebijaksanaan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu.

Pengertian kebijaksanaan menurut Friedrich (dalam Wahab, 2005;3) dimana dikatakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Chandler dan Plano dalam Pasolong (2010;38) kebijaksanaan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan erat dengan kebijakan publik. Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintahan melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Karena itu terlalu salah bila dikatakan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses mengambil dan menentukan keputusan pemerintah (Sumaryadi, 2013;83).

Kebijakan publik sangat erat dengan putusan pemerintahan dalam proses pembangunan. Kebijakan publik menjadi penting apabila kebijakan tersebut dijalankan atau diimplementasikan. Salah satu aspek terpenting dalam kebijakan pemerintah selain aspek formulasi dan evaluasi, aspek implementasi kebijakan sangat menentukan karena implementasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan.

Menurut Sumaryadi (2013;85) Secara etimologis implementasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *to implement* berarti menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu. Dan *to give* untuk menimbulkan efek/dampak. Implementasi berarti melaksanakan sesuatu yang mempunyai dampak atau hasil bagi publik.

Implementasi kebijakan menurut Agustino (2008;139) adalah merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan menurut Sumaryadi (2013;87) adalah suatu aktifitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi badan pelaksana dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

1.5 Manajemen Sampah

Sampah adalah bahan buangan padat atau semi padat yang di hasilkan dari aktivitas manusia atau hewan yang dibuang karena tidak diinginkan atau tidak digunakan lagi oleh pemakai tersebut. Sampah adalah suatu limbah yang bersifat padat terdiri dari sampah organik, sampah anorganik dan sampah bahan berbahaya beracun (B3) yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (Dep. PU, 1990) (sumber: www/tekniklingkunganunlam-manajemen-pengelolaan-sampah)

Penanganan sampah yang tidak baik dapat menimbulkan pencemaran sebagaiberikut (Hadiwiyoto, 1983) :

1. Sampah dapat menimbulkan pencemaran pada udara, akibat gas-gas yang terjadi dari penguraian sampah terutama menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu sampah mengakibatkan mengganggu penglihatan yaitu suatu area yang kotor yang mencemari rasa estetika.
2. Tumpukan sampah yang menggunung dapat menimbulkan kondisi lingkungan fisik dan kimia yang tidak sesuai dengan dengan kondisi lingkungan normal. Pada umumnya hal tersebut menimbulkan kenaikan suhu dan perubahan Ph menjadi asam atau basa. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya kehidupan manusia dan makhluk lain di lingkungan sekitarnya.

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah tersebut dapat berupa gas, cairan, uap dan padat. Permasalahan sampah perlu mendapat perhatian masyarakat mengingat semakin banyaknya sampah yang dihasilkan setiap hari sedangkan terdapat keterbatasan lahan untuk mengolah (mengelola) dan menampung sampah sampah tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menuju kepada kehidupan yang ramah lingkungan.

Terdapat banyak macam sampah, beberapa di antaranya ialah :

1. Sampah perkotaan : termasuk sampah rumah tangga, sampah dari hasil kegiatan komersil (wisata, kantor, bisnis, dsb) dan sampah runtuh bangunan.
2. Sampah industri (limbah)
3. Sampah bio-medis (termasuk sampah dari hasil kegiatan klinik ataupun rumah sakit).

4. Sampah dengan bahaya khusus : sampah radio aktif, bahan peledak, elektronik (sumber: www.tekniklingkunganunlam-manajemen-pengelolaan-sampah)

Manajemen pengelolaan (pengolahan) sampah modern :

1. Pengurukan (Landfill): menguruk sampah dengan tanah di tempat tertentu (khusus) secara masif (kuantitas besar). Tempat pengurukan umumnya dibangun pada pertambangan, galian, terowongan, lubang ataupun ruang bawah tanah yang sudah tidak digunakan/dipakai lagi. Pada metode pengurukan masa lampau menimbulkan masalah seperti sampah terbawa angin, menarik binatang kecil (kutu maupun tikus) serta menghasilkan lumeran air endapan sampah (air lindi sampah). Hasil lain dari metode pengurukan sampah ialah terbentuknya gas (umumnya gas metana dan karbon dioksida/CO₂) yang dihasilkan melalui penguraian anaerobik, dimana gas tersebut menghasilkan masalah bau dan gas efek rumah kaca. Pada metode pengurukan modern menambahkan lapisan plastik di dasar pengurukan untuk menampung air lindi sampah. Sampah yang dibuang juga dimampatkan terlebih dahulu, juga ditambahkan penutup untuk menghindari binatang kecil (kutu ataupun tikus). Ditambahkan juga di dalamnya untuk mengumpulkan gas yang dihasilkan sampah untuk menjadi bahan bakar pembangkit listrik.
2. Pembakaran dengan tungku bakar (Incineration) : proses ini mengurangi volume sampah padat hingga 30% dari volume sampah padat sebelumnya. Proses ini mengubah sampah menjadi panas, gas, uap panas dan debu (sumber: www.tekniklingkunganunlam-manajemen-pengelolaan-sampah).

Namun penggunaan metode pembakaran mengandung masalah polusi udara yang diakibatkan dari reaksi pembakaran sampah.

1. Daur ulang (Recycle) : secara umum sampah-sampah yang dapat didaur ulang antara lain aluminium (sampah kaleng minuman), tembaga (sampah kabel listrik), besi/baja (sampah tabung aerosol), polyethylene (sampah botol plastik), kaca (sampah toples dan botol kaca ataupun piring kaca), kertas (sampah koran, kardus, HVS, dsj) dan juga sampah serat (fiber) termasuk PVC, LDPE, PP dan PS serta sampah elektronika.
2. Proses ulang biologis (Biological reprocessing) : penguraian sampah organik secara alami (melalui proses alami alam) menghasilkan kompos untuk pupuk. Proses ini juga menghasilkan gas (gas metana) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
3. Pemulihan energi (Energy recovery) : membuat sampah menjadi bahan bakar langsung boiler untuk menghasilkan uap panas dan energi listrik melalui turbin. Proses ini juga dapat dilakukan dengan membuat sampah menjadi bahan bakar tidak langsung dalam bentuk lain. Proses ini terdapat 2 (dua) macam yaitu pyrolysis dan gasifikasi. Keduanya merupakan bentuk proses yang saling berkaitan dengan memberikan perlakuan panas terhadap sampah dengan suhu yang sangat tinggi dengan batasan ketersediaan oksigen. Kedua proses tersebut secara umum menggunakan tangki tertutup bertekanan tinggi. Pyrolysis pada sampah padat mengubah sampah padat menjadi padatan, cairan dan gas. Hasil cairan dan gas pyrolysis dapat dijadikan bahan bakar pembangkit listrik ataupun diolah

kembali menjadi produk kimia lain, sedangkan hasil padatan dapat diolah kembali menjadi produk karbon aktif. Gasifikasi digunakan untuk mengubah sampah organik menjadi gas sintesis yang terbentuk dari karbon dioksida (CO₂) dan hidrogen (H₂). Gas sintesis dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap (sumber: [www/tekniklingkunganunlam-manajemen pengelolaan sampah](http://www.tekniklingkunganunlam-manajemen-pengelolaan-sampah))

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir (Kartikawan, 2007) sebagai berikut :

1. Penimbunan sampah (*solid waste generated*)

Dari definisinya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sampah itu tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan (*solid waste is generated, not produced*). Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis dan kegiatannya.

Idealnya, untuk mengetahui besarnya timbulan sampah yang terjadi, harus dilakukan dengan suatu studi. Tetapi untuk keperluan praktis, telah ditetapkan suatu standar yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum. Salah satunya adalah SK SNI S-04- 1993-03 tentang Spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang. Dimana besarnya timbulan sampah untuk kota sedang adalah sebesar 2,75-3,25 liter/orang/hari atau 0,7-0,8 kg/orang/hari.

2. Penanganan di tempat (*on site handling*)

Penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah di tempatkan di tempat pembuangan. Kegiatan ini bertolak dari kondisi di mana suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah ditempat, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap selanjutnya.

Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya meliputi pemilahan (*shorting*), pemanfaatan kembali (*reuse*) dan daur ulang

(*recycle*). Tujuan utama dan kegiatan di tahap ini adalah untuk mereduksi besarnya timbulan sampah (*reduce*)

3. Pengumpulan (*collecting*)

Adalah kegiatan pengumpulan sampah dan sumbernya menuju ke lokasi TPS. Umumnya dilakukan dengan menggunakan gerobak dorong dan rumah-rumah menuju ke lokasi TPS.

4. Pengangkutan (*transfer and transport*)

Adalah kegiatan pemindahan sampah dan TPS menuju lokasi pembuangan pengolahan sampah atau lokasi pembuangan akhir.

5. Pengolahan (*treatment*)

6. Pembuangan akhir (sumber: [www/tekniklingkunganunlam-manajemen-pengelolaan-sampah](http://www.tekniklingkunganunlam-manajemen-pengelolaan-sampah))

Pada prinsipnya, pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah dengan *open dumping*, di mana sampah yang ada hanya di tempatkan di tempat tertentu, hingga kapasitasnya tidak lagi memenuhi. Teknik ini sangat berpotensi untuk menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Teknik yang direkomendasikan adalah dengan *sanitary landfill*. Di mana pada lokasi TPA dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah timbunan sampah.

Dewasa ini masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah, disisi lain masyarakat tidak ingin berdekatan dengan sampah. Seperti kita ketahui bersama bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan. Gangguan yang ditimbulkan meliputi bau, penyebaran penyakit hingga terganggunya estetika lingkungan. Beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem penanganan sampah sistem yang terjadi selama ini adalah :

1. Dari segi pengumpulan sampah dirasa kurang efisien karena mulai dari sumber sampah sampai ke tempat pembuanganakhir, sampah belum

dipilah-pilah sehingga walaupun akan diterapkan teknologi lanjutan berupa *komposting* maupun daur ulang perlu tenaga untuk pemilahan menurut jenisnya sesuai dengan yang dibutuhkan, dan hal ini akan memerlukan dana maupun menyita waktu.

2. Pembuangan akhir ke TPA dapat menimbulkan masalah, diantaranya Perlu lahan yang besar bagi tempat pembuangan akhir sehingga hanya cocok bagi kota yang masih mempunyai banyak lahan yang tidak terpakai. Bila kota menjadi semakin bertambah jumlah penduduknya, maka sampah akan menjadi semakin bertambah baik jumlah dan jenisnya. Hal ini akan semakin bertambah juga luasan lahan bagi TPA. Dapat menjadi lahan yang subur bagi pembiakan jenis-jenis bakteri serta bibit penyakit lain juga dapat menimbulkan bau tidak sedap yang dapat tercium dari puluhan bahkan ratusan meter yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika dan keindahan lingkungan. (sumber: [www/tekniklingkunganunlam-manajemen-pengelolaan-sampah](http://www.tekniklingkunganunlam-manajemen-pengelolaan-sampah))

1.6 Evaluasi

Mustopadidjaja (2003;45) mengatakan bahwa "evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena, yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai".

Lebih lanjut Arifin (2010:5) mengatakan, "evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi"

Menurut Simamora (1999:415) penilaian adalah proses dengan organisasi mengevaluasi pelaksanaan tugas individu. Lebih lanjut menurut Zweig dalam Simamora (1999:414-415) mengartikan penilaian/evaluasi adalah proses penilaian hasil kerja yang akan digunakan pihak manajemen untuk 27ember informasi kepada karyawan secara individual, tentang mutu hasil pekerjaannya.

Sedangkan kriteria/indikator evaluasi menurut Dunn (2003:610) sebagai berikut :

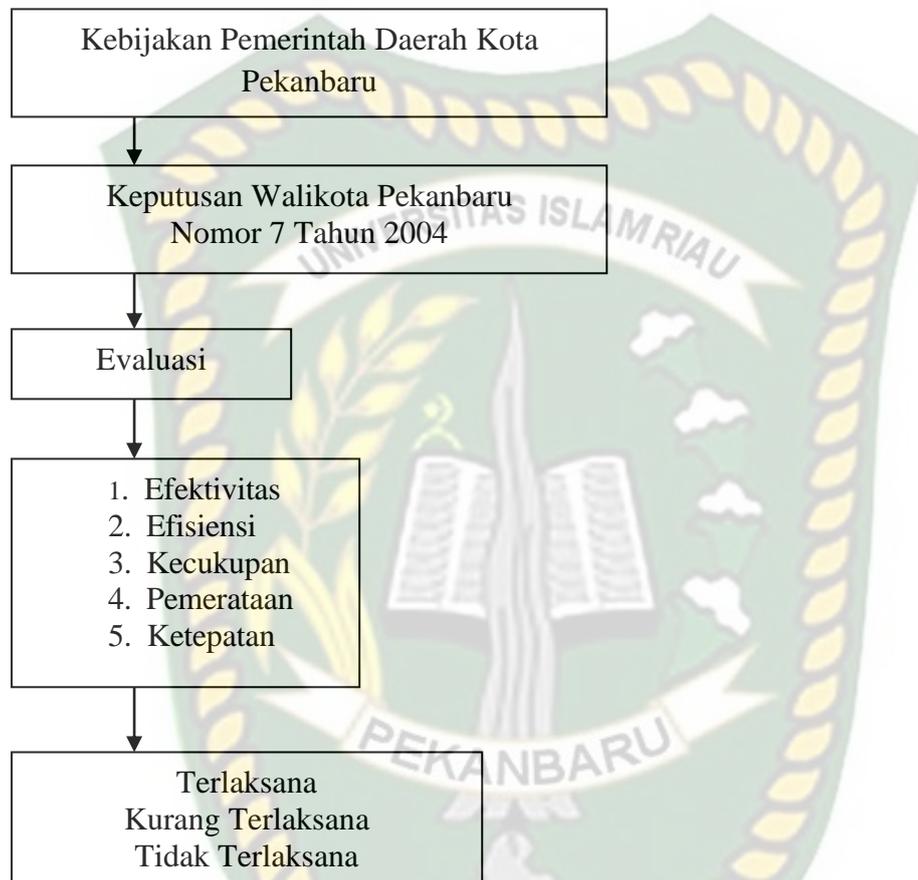
1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah dicapai
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah
4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda
5. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar – benar berguna atau bernilai.

B. Kerangka Pikiran

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah berupa Keputusan Walikota Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru dimaksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan kebersihan. Guna mensukseskan visi Kota Pekanbaru yaitu terwujudnya program K3.

Berdasarkan pandangan ini dapatlah digambarkan dasar pikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar II.1: Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru.



Sumber: Modifikasi Penulis Dari Sejumlah Dasar Teoritis

C. Konsep Operasional dan Operasionalisasi Variabel

1. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran atas istilah yang digunakan, maka diberikan batasan konsep yang dioperasional sebagai berikut:

1. Evaluasi yang dimaksud disini adalah penilaian yang dilakukan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7

Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru

2. Pengelolaan kebersihan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk membuat suatu daerah/wilayah menjadi bersih yang meliputi penyapu sampah, pengumpul sampah lingkungan perumahan, pertokoan, perkantoran, hotel dan restoran dan unit lainnya ke TPS, pengangkutan sampah ke TPA
3. Efektivitas dalam tulisan ini adalah tidak adanya sampah yang berserakan diberbagai tempat karena petugas bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
4. Efisiensi dalam tulisan ini adalah walaupun jumlah petugas persampahan /kebersihan yang dimiliki oleh Kecamatan minim namun mampu memberikan pelayanan persampahan/kebersihan dengan baik
5. Kecukupan dalam tulisan ini adalah ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah disembarang tempat dan juga ketersediaan mobil pengangkut sampah.
6. Pemerataan dalam tulisan ini adalah pelayanan persampahan dilakukan secara merata tidak saja di jalan-jalan besar namun juga di lingkungan perumahan, selain itu merata di seluruh wilayah kecamatan tanpa terkecuali.
7. Ketepatan dalam tulisan ini adalah sampah tidak ada lagi yang berserakan karena ketepatan petugas dalam menyapu dan mengangkut sampah.

2. Operasionalisasi Variabel

Agar penelitian tentang Evaluasi Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru ini lebih mudah dipahami arahnya, maka dilakukan operasional variabel sebagai berikut ini:

Tabel II.1: Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Kriteria	Item penilaian
1	2	3	4	5
Evaluasi Kebijakan merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena, yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai". Mustopadi djaja (2003:45)	Evaluasi	1. Efektifitas	a. Tidak ada sampah yang berserakan b. Petugas bekerja dengan penuh tanggung jawab	Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
		2. Efisiensi	a. Jumlah petugas yang minim namun mampu memberikan pelayanan Kebersihan dengan baik	Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
		3. Kecukupan	a. Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) b. Jumlah mobil pengangkut sampah	Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
		4. Pemerataan	a. Tidak saja di jalan-jalan besar tapi juga dilingkungan perumahan	Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
		5. Ketepatan	a. Pengangkutan sampah dilakukan tepat waktu	Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana

3. Teknik Pengukuran

Adapun pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan persentase (%) dengan tiga kategori penilaian yakni Terlaksana, Kurang Terlaksana dan Tidak Terlaksana.

Variabel Penelitian, dikatakan:

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 0% - 33% .

Sedangkan pengukuran indikator variabel adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas, dikatakan:

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 0% - 33% .

2. Efisiensi, dikatakan :

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 0% - 33% .

3. Kecukupan, dikatakan :

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 0% - 33% .

4. Pemerataan, dikatakan :

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 0% - 33% .

5. Ketepatan, dikatakan :

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 0% - 33% .